STRATEGI KOMUNIKASI PENERTIBAN RUANG MILIK JALAN DI GORONTALO OUTER RING ROAD (GORR)

Muhammad Syahrul R. Katili

NPP. 32. 0964

Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Email:

syahrul.indonesia24@gmail.com

Pembimbing Skripsi:

Mu'tamirudin S.Ag, MSi

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): The issue of road space utilization illustrates the problems in spatial planning to realize the golden Indonesia 2045. The violations of road space utilization that occur along the Gorontalo Outer Ring Road that can cause accidents show the lack of supervision and control carried out by Satpol PP. The complexity of the problem is exacerbated by repressive actions taken by Satpol PP that only lead to reprimands without providing an understanding of the utilization of road space to the public. Satpol PP's communication strategy is needed to increase public understanding so that it can create awareness in the community itself. ***Purpose:*** The purpose of this study is to elaborate the dynamics of road space arrangement both in terms of government actions and community responses using the Communication Strategy theoretical framework. ***Method:*** The research was conducted in Gorontalo Outer Ring Road using descriptive qualitative approach. The research data was collected through interviews with Satpol PP and the community. The interview data was then verified by triangulating observation and documentation data. ***Result:*** The communication strategy of the Gorontalo Province Pamong Praja Police Unit has not gone well, because there is still one indicator that is the benchmark for the success of the communication strategy, namely the credibility and attractiveness indicators in the dimension of the communicator's role in communication have not been implemented and measured properly.

Keywords: *Street Space; Communication Strategy; Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Isu pemanfaatan ruang milik jalan menggambarkan bagaimana permasalahan dalam penataan ruang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan yang terjadi di sepanjang jalan Gorontalo Outer Ring Road yang dapat menimbulkan kecelakaan menunjukkan kurangnya pengawasan maupun penertiban yang dilakukan oleh Satpol

PP. Kompleksitas masalah diperparah oleh tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP hanya berujung pada teguran tanpa memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan ruang milik jalan kepada masyarakat. Perlunya strategi komunikasi Satpol PP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat itu sendiri. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini mengelaborasi dinamika penataan ruang milik jalan baik dalam aspek tindakan pemerintah dan respon masyarakat menggunakan kerangka teori Strategi Komunikasi. Penelitian dilaksanakan di Gorontalo Outer Ring Road dengan pendekatan kualitatif deskriptif. **Metode:** Data penelitian dikumpulkan melalui hasil wawancara kepada Satpol PP dan masyarakat. Data hasil wawancara kemudian diverifikasi dengan triangulasi data observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Temuan menunjukkan kurangnya kredibilitas Satpol PP di mata masyarakat menimbulkan kurangnya motivasi masyarakat melaksanakan pesam yang disampaikan oleh Satpol PP. Rekomendasi penelitian menekankan pada evaluasi dalam internal Satpol PP serta memperbaiki kredibilitas Satpol PP di mata masyarakat.

Kata Kunci: Ruang Milik Jalan; Strategi Komunikasi; Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu isu pada perkembangan kota di masa sekarang. Umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang pasti diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman masyarakat ataupun kegiatan ekonomi. Karena adanya keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi lahan yang seharusnya sebagai ruang publik dijadikan daerah pemukiman penduduk ataupun kegiatan ekonomi (Tarigan et al., 2021).

Perencanaan penggunaan lahan di beberapa negara di dunia memiliki tantangan yang beragam jenis. Perencanaan di Nepal memiliki masalah lintas sektoral yakni rencana dan kebijakan tentang pengembangan lahan tidak memperhatikan kewenangan yang tumpang tindih antar lembaga dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat serta kurang memperhatikan umpan balik dari masyarakat umum dan para pemangku kepentingan lokal (Chand, 2019).

China sebagai negara produksi pangan terbesar di dunia memiliki masalah konflik tata ruang antara lahan pertanian dan konstruksi. Konflik ini disebabkan oleh persediaan air yang melimpah, dan tingkat kesesuaian tertinggi untuk produksi pertanian dan pembangunan perkotaan, sehingga menjadi sangat rentan terhadap persaingan lahan antara lahan pertanian dan lahan konstruksi. Akibatnya produksi pertanian dan pembangunan perkotaan sama-sama menimbulkan kerusakan pada lingkungan ekologis, dan lahan ekologis kemungkinan akan dikorbankan dan ditempati untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan yang disarankan (Chen & Cai, 2022).

Berbeda dengan Nepal dan China, Ethiopia salah satu negara yang terletak di tanduk afrika memiliki masalah tersendiri. Addis Adaba ibu kota negara Ethiopia yang memiliki jumlah kepadatan penduduk mencapai 6600 orang per km² dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,5 % per tahun akan melebihi jumlah kepadatan optimal (15.000 orang per km²) pada 2051. Akibat dari pertumbuhan penduduk ini menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah membuat pemukiman yang tidak sesuai aturan dan menghasilkan lingkungan yang tidak berstandar dan berkelanjutan (Koroso & Zevenbergen, 2024).

Perkembangan ekonomi di suatu daerah memicu bertambahnya jumlah penduduk, kemudian penambahan penduduk mempengaruhi ketersediaan lahan terbangun meliputi permukiman dan fasilitas pendukung (Al Rosyid et al., 2021). dalam melakukan pembangunan berkelanjutan terutama yang bersifat fisik, diperlukan ruang atau lahan sebagai tempat melakukan pembangunan, sedangkan jumlah luas lahan yang tersedia terbatas, hal ini mendorong terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Terdapat 3 makna yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yakni: a) pemanfaatan sumber daya untuk kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan yang diperlukan kedepannya; b) pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan faktor daya dukung lingkungan; c) pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara optimal (Umar, 2021)

Pada Tahun 2021 Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah memproses lebih dari 3.200 pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil audit tata ruang di 121 kabupaten-kota di seluruh Indonesia termasuk yang berasal dari pengaduan masyarakat. Temuan ini banyak ditemukan di kawasan perkotaan dengan berbagai jenis pelanggaran seperti tidak adanya akses publik, tidak memenuhi persyaratan perzinan hingga tidak memiliki izin sama sekali. Pelanggaran ini terjadi merata di seluruh Indonesia mulai dari pulau Sumatera hingga pulau Papua. Dari 3,200 pelanggaran tersebut sebanyak 1.200 pelanggaran pemanfaatan ruang sudah dilakukan penertiban oleh pemerintah (Tempo, 2021).

Dengan peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat di Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya alam, terutama lahan untuk pemukiman maupun usaha. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti fenomena yang terjadi di Kota Gorontalo mengenai alih fungsi lahan pertanian yakni, begitu suatu kawasan perumahan diatas persawahan produktif, tidak membutuhkan waktu yang lama kompleks perumahan itu akan melakukan ekspansi ke sekitar lahan terbangun. Lama kelamaan semakin besar konversi lahan pertanian yang terjadi. Selain konversi lahan pertanian karena pembangunan permukiman, pembangunan kawasan-kawasan perkantoran, public service dan kawasan perdagangan juga dilakukan di areal pertanian. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar di Kota Gorontalo (Moliju et al., 2024).

Peran pengawasan terhadap pemanfaatan ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang milik jalan. Penyusunan peraturan daerah (Perda) perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penataan ruang di tingkat daerah. Perda bertujuan untuk menyelaraskan penggunaan lahan secara terpadu dan terencana, serta mengawasi kegsiatan pembangunan di daerah (Anugrah et al., 2023). Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.

Namun dalam penegakan perda di beberapa daerah sering terjadi ketidaktegasan oleh OPD yang menjalankan tata ruang, dimana saat ditemukan pelanggaran yang terjadi dan kemudian akan ditegakkan para pelanggar seringkali mencari alasan pembenar dengan melihat peraturan perundangan sektoral yang membenarkan situasi tersebut. Akibatnya perda tata ruang yang seharusnya menjadi acuan dalam menilai pelanggaran menjadi tersamarkan dengan aturan-aturan sektoral lainnya yang beberapa bertentangan dengan perda tata ruang tersebut (Sutaryono et al., 2021).

Penegakan perda yang dilakukan di kota Bandung yakni penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung belum berjalan dengan efektif baik dari segi efektivitas peran dan legalitas, ketidakefektifan penertiban ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya Satpol PP Kota Bandung (Rukmana, 2020).

Penertiban bangunan liar yang dilaksanakan di Kota Bekasi masih menemui perlawanan dari masyarakat sekitar sehingga menyebabkan terhambatnya proses penertiban, perlawanan dari masyarakat terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan komunikasi yang baik oleh Satpol PP Kota Tangerang untuk memberikan pemahaman secara berkala dan memberikan informasi secara detail dan komprehensif agar masyarakat dapat memahami bahwa aturan yang berlaku harus ditegakkan (Salsabila et al., 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang masyarakat tidak taat dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengingatkan masyarakat melalui komunikasi yang baik, komunikasi persuasif menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan karena dapat mendorong, menyemangati serta memotivasi masyarakat agar dapat berkomitmen dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Komitmen masyarakat yang kuat akan menghasilkan konsensus yang dapat menguntungkan dan diterima secara baik oleh seluruh pihak (Eviany, 2019). Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Metro dapat menjadi contoh yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Strategi Satpol PP Kota Metro dengan menggunakan metode pendekatan secara persuasif dan humanis melalui komunikasi yang baik terbukti dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah tidak lagi dipandang arogan dalam memberikan

pelayanan sehingga pedagang dapat memberikan feedback yang baik kepada pemerintah (Simarmata, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada permasalahan pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) mengundang antusiasme masyarakat untuk menikmati pemandangan yang ditawarkan ketika melintasi jalan ini, namun karena keindahan yang ditawarkan banyak masyarakat yang berhenti dan memarkirkan kendaraannya secara serampangan sehingga menghambat arus lalu lintas di sekitar jalan. bahkan masyarakat secara terang-terangan memarkirkan kendaraannya di dekat spanduk larangan parkir. Padahal dalam perda sudah diatur tentang larangan untuk menghambat dan menutup fungsi ruang milik jalan dengan memarkirkan kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2024 ditemukan adanya 71 pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan yang ditemukan di sepanjang jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Tabel 1.

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR)

WILAYAH	JENIS BANGUNAN	JUMLAH PELANGGARAN
Kabupaten Gorontalo	Tempat Usaha	60
	Rumah	4
	Tempat Ibadah	1
	Lahan Galian	1
	Lahan Parkiran	1
Kabupaten Bone Bolango	Tempat Usaha	4
TOTAL		71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo. 2024

Banyaknya pelanggaran ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah mengingat peran Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) bagi ekonomi provinsi Gorontalo, yang mana jalan ini dibangun untuk mengurangi kemacetan di provinsi Gorontalo dengan menghubungkan langsung Bandara Djalaluddin dengan Pelabuhan Ferry serta meningkatkan konektivitas wilayah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi karena jalan ini menjadi jalan arteri primer yang terletak antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Isimu dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Gorontalo (Wasanta et al., 2020).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks ruang milik jalan maupun konteks strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam melakukan penertiban. Penelitian Maulana dan Fitri yang berjudul *Penegakan Hukum Bagi Pengguna Ruang Milik Jalan Untuk Tempat Berjualan Oleh Pelaku Usaha* (Maulana & Fitri, 2022), menemukan bahwa penegakan hukum yang efektif dalam mewujudkan ketertiban usaha di kota Banda Aceh dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yakni dengan meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha melalui penyuluhan, melakukan pengawasan secara rutin melalui patroli yang dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh Satpol dengan pengawasan secara rutin dapat membentuk kebiasaan kepada masyarakat, selain itu melakukan penerapan sanksi secara tegas melalui bentuk sanksi yang konkrit kemudian mekanisme penjatuhannya yang jalan dan implementasi di lapangan yang baik. Penelitian berjudul *Communication and coordination Innovations in Improving The Performance Of Permit Suitability For Spatial Use Activities* (Riau et al., 2024), menunjukkan pentingnya sumber daya manusia dalam komunikasi dan koordinasi yang dilakukan melalui Forum Tata Ruang untuk membahas berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, untuk meningkatkan hasil perizinan dalam rapat yang membahas tentang pemanfaatan ruang diperlukan juga pemberian materi yang bersifat teknis kepada para peserta rapat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta. Standar Operasional Prosedur juga diperlukan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan proses perizinan pemanfaatan ruang. Penelitian Barokah dan Aprimawati yang berjudul *The Communication Strategy Of The Civil Service Police Unit In The Relocation Of Traders* (Barokah & Aprimawati, 2024), menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang dalam melakukan relokasi pedagang pasar di Kota Tangerang didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi-instansi yang terlibat dalam revitalisasi pasar anyar, selain itu pendekatan yang dilakukan kepada orang-orang yang memiliki pengaruh di wilayah pasar juga berhasil dilakukan melalui pendekatan persuasif. Penelitian berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah* yang dilakukan oleh Tefa dan Purbosiwi menemukan bahwa kurangnya kesadaran pedagang kaki lima menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penertiban, yang mana banyak ditemukan pelanggaran yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran yang sama walaupun sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan penyitaan barang (Tefa & Purbosiwi, 2023). Penelitian tentang *Strategi Penertiban Tempat Karaoke Di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara* oleh Firdaus dan Eviany menemukan bahwa bentuk pengarahan yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara adalah sosialisasi secara lisan kepada masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin melalui operasi mingguan yang menyasar tempat karaoke di Pantai Pungkruk (Firdaus & Eviany, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Strategi Komunikasi dalam melakukan penertiban ruang milik jalan yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas dari segi strategi komunikasi penertiban. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus terhadap efektivitas penegakan hukum, komunikasi dan koordinasi dalam perizinan dan strategi komunikasi pada relokasi pasar. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Onong Uchjana Effendy (Effendy, 2009) yang menyatakan bahwa strategi komunikasi bisa terjadi melalui empat tahap, yaitu mengenali sasaran komunikasi, mengkaji penyajian tujuan pesan, memilih media komunikasi, dan menyiapkan komunikator dalam komunikasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi penertiban ruang milik jalan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR)

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang memandang bahwa realitas atau gejala sosial bersifat kompleks dan tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan secara kaku. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang berlangsung secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna di balik suatu fenomena daripada melakukan generalisasi.

Pendekatan deskriptif dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menggambarkan, serta menganalisis secara langsung permasalahan dan fokus penelitian di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap berbagai dokumen yang ditemukan selama penelitian berlangsung, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai Strategi Komunikasi Penertiban Ruang Milik Jalan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan, Petugas Tindak Internal Satpol PP dan 5 orang dari kelompok masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori strategi komunikasi yang digagas oleh Onong Uchjana Effendy (Effendy, 2009) yang menyatakan bahwa strategi komunikasi disusun melalui empat tahap, yaitu mengenali

sasaran komunikasi, mengkaji tujuan pesan, memilih media komunikasi, dan menyiapkan komunikator yang kredibel.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan; (2) penyajian data, yakni pengorganisasian data dalam bentuk narasi, matriks, ataupun tabel agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data yang telah disajikan guna menjawab fokus permasalahan penelitian (Simangunsong, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Strategi Komunikasi Penertiban Ruang Milik Jalan Di Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan teori strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy, 2009. Hal ini bertujuan untuk memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur strategi komunikasi yang dilakukan telah berjalan secara optimal atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya.

3.1. Mengenal Sasaran Komunikasi

Dalam mengenali sasaran komunikasi terdapat dua komponen penting yang perlu diperhatikan agar menciptakan komunikasi efektif, yakni bagaimana kemampuan Satpol PP dalam mengenali karakter dari komunikan dan bagaimana kemampuan Satpol PP dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan mendukung terjadinya komunikasi yang baik. Penulis melakukan analisis terhadap cara Satpol PP mengenali sasaran komunikasi dalam pelaksanaan penertiban ruang milik jalan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan analisis terhadap cara Satpol PP dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif saat proses komunikasi dilaksanakan.

1. Mengenal Karakter Komunikan

Anggota Satpol PP sebelum turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pembinaan, penyuluhan maupun penertiban anggota Satpol PP sebelumnya melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten, aparat desa maupun tokoh masyarakat setempat untuk berkonsultasi mengenai karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan sekaligus meminta bantuan tokoh masyarakat setempat dan aparat desa agar dapat melakukan kolaborasi bersama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP juga sudah memiliki data para pelanggar yang akan ditertibkan baik dari identitas pelanggar maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Satpol PP juga melakukan survei terlebih dahulu dengan

didampingi aparat pemerintah wilayah setempat untuk mengetahui lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran serta melakukan konsultasi tentang bagaimana perilaku masyarakat setempat agar kegiatan dapat dilakukan dengan efektif dan tanpa terjadinya penolakan dari masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mengundang tokoh masyarakat setempat, yang lebih tahu kondisi masyarakat dan dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Pendekatan seperti ini dipilih mengingat jalan ring road ini cukup panjang dan di sepanjang jalan banyak tinggal masyarakat dari berbagai kalangan dan dari latar belakang yang beragam.

Dalam dokumen SOP juga bisa dilihat tahapan persiapan sebelum melakukan kegiatan penertiban dan penyuluhan. Uraian tahap persiapan pembinaan dan penyuluhan sebagai berikut:

“Tahap persiapan pembinaan dan penyuluhan antara lain:

- a. Penetapan sasaran (masyarakat, kelompok, badan hukum) waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), dan obyek yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan;
- b. Penetapan tempat (formal dan informal sesuai kondisi lapangan), bentuk dan metode pembinaan dan penyuluhan (formal dan informal);
- c. Survei lapangan;
- d. Penyiapan administrasi pelaksanaan (SEPERTI, materi; dan sebagainya); dan
- e. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan.”

Pelaksanaan persiapan penertiban melalui komunikasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Satpol PP terlihat sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

2. Melihat Situasi Dan Kondisi

Dalam kegiatan penertiban dan pembinaan Satpol PP Provinsi Gorontalo terlihat bahwa selama proses kegiatan tidak menemui banyak hambatan serta tidak terjadi adanya penolakan dari masyarakat setempat. Masyarakat juga terlihat tenang saat proses pembinaan yang dilaksanakan dalam lingkup berkelompok, bahkan dalam beberapa momen bisa dilihat masyarakat yang lapaknya menjadi target penertiban ikut membantu anggota Satpol PP untuk memindahkan lapaknya.

Satpol PP sebelum melakukan pembinaan dan penertiban menciptakan suasana yang kondusif sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan nyaman. Pemberian konsumsi sebelum sosialisasi juga menjadi sebuah bentuk strategi Satpol PP untuk memastikan agar audiens atau komunikan dapat menerima pesan dalam kondisi tubuh yang fit dan siap menerima pesan.

Namun masih ditemukan oknum masyarakat yang masih dalam pengaruh minuman alkohol saat dilaksanakan kegiatan pengawasan sehingga menyusahkan petugas untuk melakukan komunikasi dua arah yang baik dan berpotensi menimbulkan keributan.

3.2 Pemilihan Media Komunikasi

Dalam proses komunikasi, komunikator memulai kegiatan komunikasi perlu menyandikan informasi sesuai dengan kondisi dan nalar komunikan. Berbeda halnya dalam konteks penggunaan media komunikasi seperti telepon, faksimile, e-mail, handphone dan sejenisnya, terlebih dahulu komunikator perlu memastikan bahwa komunikan dapat menggunakan media komunikasi tersebut dengan baik agar dapat memaksimalkan pencapaian tujuan komunikasi. Faktor media ini walaupun bersifat software namun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan dalam berkomunikasi. Agar sebuah pesan yang dibuat oleh komunikator bisa tersampaikan dan diterima oleh komunikan maka diperlukan sebuah perantara yang disebut sebagai media. Di era digital yang sudah modern ini sudah terdapat berbagai jenis media yang bisa digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan pesan, dari media yang menggunakan visual, audio hingga media yang menggabungkan kedua jenis tersebut (Hasan, 2010). Keberagaman media ini menciptakan pembagian kelompok di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan strategi dari Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk menentukan media yang akan digunakan dalam menyampaikan kebijakan khususnya tentang tertib jalan di kawasan GORR.

1. Jenis Media Yang Digunakan

Dalam memilih media yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan, Satpol PP Provinsi Gorontalo menggunakan jenis media yang beragam untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dari anak muda hingga orang dewasa. Pemanfaatan teknologi modern juga digunakan oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk menyebarkan peraturan daerah terkait ketertiban umum, Satpol PP Provinsi Gorontalo melalui bagian humas sedang mengembangkan sosial media milik instansi agar dapat dimaksimalkan dalam melakukan kampanye tertib jalan di Provinsi Gorontalo khususnya di kawasan GORR. Selain menggunakan sosial media, Satpol PP juga tetap melakukan pendekatan secara langsung dengan memasang baliho atau pun poster di sepanjang jalan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di GORR maupun sosialisasi di sekolah yang berada di sekitar GORR dengan menargetkan khusus kepada siswa siswi yang melewati jalan GORR saat berpergian ke sekolah.

Satpol PP menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan sosial media untuk menjangkau masyarakat karena tidak bisa dipungkiri saat ini media komunikasi digital memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Namun Satpol PP juga tetap melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat seperti melakukan sosialisasi baik dengan terorganisir seperti sosialisasi di fasilitas pendidikan maupun edukasi secara langsung saat sedang melakukan razia atau saat kegiatan patroli.

Kampanye melalui Sosial Media yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo memang cukup aktif dilakukan dan memberikan dampak yang signifikan. Observasi peneliti memantau jumlah pengikut maupun jumlah postingan dari akun sosial media Satpol PP Provinsi Gorontalo yang disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 2.

Data Jumlah Pengikut Dan Postingan Sosial Media Satpol PP Provinsi Gorontalo

JENIS PLATFORM	JUMLAH PENGIKUT	JUMLAH POSTINGAN
INSTAGRAM	1.138	1.005
FACEBOOK	279	298
TIKTOK	3.335	256
YOUTUBE	59	72

Hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang pernah melintasi GORR menunjukkan bahwa para pengendara yang melintasi jalan ini sudah sering melihat spanduk yang terpasang di pinggir jalan ketika melewati jalan ini dan mengakui sudah banyak perkembangan yang terjadi, dari yang sebelumnya banyak terlihat lapak dagangan dan penjual yang berjualan di pinggir jalan hingga sudah tidak ada lagi terlihat lapak dagangan dari para penjual dan pedagang kaki lima, selain itu sudah banyak juga spanduk larangan yang terpampang di pinggir jalan.

Di beberapa titik jalan GORR sudah terpasang spanduk yang berisi tentang aturan. Poster yang terpampang berukuran sedang yang cukup mudah terbaca dan dilihat oleh masyarakat yang melintasi GORR namun saat malam hari sulit untuk terbaca karena tidak ada penerangan yang mendukung.

3.3 Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Pesan yang disampaikan dalam setiap komunikasi tentu memiliki sebuah makna yang terkandung di dalamnya, makna pesan bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat tergantung kebutuhannya. Pesan juga bisa memiliki berbagai jenis tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah komunikasi. Dengan mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai, seorang komunikator bisa mengetahui teknik apa yang akan digunakan dan memformulasikan cara yang terbaik dalam menyampaikan pesan tersebut. Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam komunikasi kepada masyarakat memiliki satu tujuan utama yakni mewujudkan tertib jalan di Provinsi Gorontalo khususnya di GORR.

1. Teknik Penyampaian Pesan

Teknik penyampaian pesan yang digunakan bisa bersifat informatif, persuasif dan instruktif disesuaikan dengan tujuannya. Satpol PP Provinsi Gorontalo sesuai

dengan tujuannya juga menerapkan cara yang berbeda-beda di setiap kondisi yang ada, dalam implementasinya Satpol PP lebih menggunakan teknik yang bersifat informatif karena salah satu fokus utama yang ingin diubah adalah kesadaran masyarakat sehingga diharapkan dapat membawa perubahan perilaku di masyarakat. Dalam menyampaikan informasi ke masyarakat juga Satpol menggunakan pendekatan yang humanis dan selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan mengkombinasikan dengan analogi-analogi sederhana

Satpol PP menekankan pada pendekatan yang humanis agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat anggota selalu mengedukasi terlebih dahulu karena banyak warga yang melanggar karena tidak mengerti aturan yang ada bukan karena ingin melanggar, sehingga ini menjadi evaluasi juga bahwa aturan ini belum tersampaikan sepenuhnya ke seluruh masyarakat. Memang dalam beberapa kasus ada masyarakat yang keras kepala dan acuh terhadap aturan ini namun diingatkan dengan cara yang persuasif. Satpol PP juga menyesuaikan dengan kondisi kecerdasan masyarakat yang berada di lokasi karena tidak semua masyarakat dapat mengerti dengan baik jika aturan yang ada disampaikan dengan bahasa yang sulit dimengerti.

Satpol PP mengutamakan faktor kemanusiaan dan sangat menghindari adanya kekerasan dan konflik sehingga menggunakan teknik informatif dan persuasif. Kemudian untuk pesan yang disampaikan melalui media sosial mengutamakan isi yang singkat, padat dan jelas dan menggunakan bahasa yang ringan karena menjangkau di segala kalangan umur. Selain menggunakan penyampaian secara tulisan maupun lisan, Satpol PP juga menggunakan pesan video dengan menampilkan konten yang bersifat edukasi dan diselipkan contoh-contoh bentuk pelanggaran serta dampak terhadap lingkungan ataupun diri sendiri. Konten-konten yang dimuat di sosial media Satpol PP terdapat beragam video dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP hingga konten video pendek (reels) untuk edukasi kepada masyarakat. Dan untuk pesan visual dibuat melalui poster yang disebar di berbagai sosial media Satpol PP Provinsi Gorontalo. Teknik penyampaian pesan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Yang Berlaku, yakni:

“Dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, anggota Satpol PP juga harus mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat, kelompok dan badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan Perda, Perkada dan produk hukum lainnya dengan cara:

- 1) Mendengarkan keluhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum dengan seksama;
- 2) Jangan memotong pembicaraan orang;
- 3) Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya;
- 4) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat, kelompok, dan badan hukum; serta
- 5) menjadi pembicara yang baik.

Setelah mendengar keluhan yang harus dilakukan anggota Satpol PP:

- 1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
- 2) Menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar Perda dan/atau Perkada dan produk hukum lainnya.
- 3) Berani menegur masyarakat, kelompok, maupun badan hukum termasuk aparat pemerintah lainnya yang melakukan tindakan pelanggaran”

3.4 Peranan Komunikator Dalam Komunikasi

Setiap komponen dalam sebuah komunikasi memiliki pengaruh terhadap hasil komunikasi yang dilakukan, salah satu komponen penting untuk menghasilkan komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, aparat Satpol PP harus mempersiapkan setidaknya 2 (dua) hal yang menjadi indikator komunikator yang baik. Berikut beberapa penjelasan mengenai 2 (dua) indikator tersebut:

1. Kredibilitas

Kredibilitas akan mempengaruhi persepsi masyarakat dan citra instansi Satpol PP, jika memiliki kredibilitas yang buruk maka sulit bagi masyarakat untuk mematuhi dan mendengarkan arahan dari Satpol PP. Membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan konsistensi dan kerja keras dalam waktu yang lama, untuk membangun kepercayaan ini tidak hanya membangun citra lembaga yang positif dimasyarakat tetapi juga harus diikuti dengan tingkah laku baik oleh setiap aparat Satpol PP. Sepanjang tahun 2024 terdapat setidaknya 2 (dua) kasus yang melibatkan Satpol PP Provinsi Gorontalo, yaitu kasus pelecehan oleh Kasatpol PP sebelumnya terhadap salah satu pegawainya dan kasus pemukulan anggota Satpol PP terhadap salah satu pemotor di kawasan Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo. Dari beberapa kasus tersebut saat ini Satpol PP Provinsi Gorontalo sedang membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan segera menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan evaluasi. Selain itu Satpol PP Provinsi Gorontalo juga melakukan berbagai kegiatan positif yang salah satunya adalah melakukan kerja bakti pembersihan sampah di sepanjang jalan GORR. Selain itu sebelum melakukan penertiban dan penyuluhan Satpol PP melakukan persiapan dengan menyiapkan surat perintah tugas yang menjadi dasar hukum dan materi peraturan daerah yang menjadi fokus penyuluhan. Setiap anggota Satpol PP juga ditekankan untuk selalu menghafal dan memahami isi SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, Dari sisi kredibilitas individu masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu masih ada anggota yang belum memahami isi peraturan yang ditegakkan sehingga ketika ditanyakan oleh masyarakat masih terlihat kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan.

Dari faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo terlihat bahwa masih memiliki kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas anggota Satpol PP, sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP Provinsi Gorontalo disajikan pada tabeli dibawah ini:

Tabel 3.**Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan**

No.	Golongan	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah (Orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Golongan IV	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Golongan III	-	-	1	1	8	1	-	1	1	-	-	-	-	-	13
3	Golongan II	-	-	-	-	-	-	1	1	17	1	-	-	-	-	20
4	Kontrak	-	-	-	-	4	1	-	-	19	3	3	-	-	-	30
Jumlah		-	-	5	1	12	2	1	2	37	3	3	-	-	-	68

2. Daya Tarik

Daya tarik seorang komunikator bisa dilihat dari fisiknya, fisik disini sudah mencakup penampilan maupun postur badan yang dimiliki. Seseorang akan lebih mudah tergerak perasaan dan sikapnya terhadap seorang komunikator yang memiliki fisik yang menarik dan berpenampilan rapi. Untuk itu setiap anggota Satpol PP saat turun melakukan penertiban di masyarakat wajib menggunakan pakaian dinas yang rapi dan menjaga postur tubuh. Berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Gorontalo tertuang jelas dalam melakukan kegiatan penertiban maupun pembinaan dan penyuluhan setiap anggota Satpol PP diwajibkan menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satpol PP selalu melakukan apel untuk mengecek kesiapan setiap anggota. Dan apabila ditemukan anggota yang tidak menggunakan pakaian dinas yang sesuai dengan ketentuan maka akan diberikan peringatan dan tidak akan diikutkan dalam kegiatan penertiban. Penggunaan pakaian dinas yang sesuai ketentuan menjadi sangat penting karena pastinya masyarakat selalu melihat dan menilai setiap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, dengan menggunakan pakaian dinas, setiap anggota harus bisa menjaga segala tindak tanduknya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seragam yang digunakan dan masyarakat juga menjadi segan ketika anggota Satpol PP bertugas dengan pakaian yang baik.

Namun berkaitan dengan postur tubuh anggota, penulis melihat masih terdapat beberapa anggota satpol pp yang memiliki berat badan berlebih sehingga berpengaruh terhadap postur tubuh yang menjadi kurang menarik. Masih diperlukan pembinaan yang lebih tegas terhadap anggota-anggota yang tidak dapat menjaga postur tubuhnya

dengan baik, dengan adanya kegiatan pembinaan fisik dan jasmani diharapkan dapat membentuk disiplin dan dapat meningkatkan kondisi tubuh para anggota Satpol PP.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, baik dari segi metode penelitian, teori yang digunakan, maupun objek kajian. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi lebih jelas, yaitu berupaya mengisi kekurangan serta melengkapi aspek-aspek yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap situasi yang berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi komunikasi penertiban ruang milik jalan oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo, ditemukan sejumlah temuan utama yang dapat dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa temuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan, perbedaan, sekaligus penemuan aspek baru yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya ketertiban ruang milik jalan di lingkungan masyarakat adalah dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Maulana Dan Fitri yang dilakukan di kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha adalah salah satu penegakan hukum yang efektif, kesadaran hukum ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum (Maulana & Fitri, 2022).

Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu strategi yang dilakukan dalam melakukan penertiban adalah kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional yang berlaku. Temuan ini menunjukkan adanya kesamaan dengan hasil temuan dari Barokah Dan Aprimawati yang menyatakan bahwa untuk mengantisipasi konflik dengan masyarakat akibat citra negatif Satpol PP di masyarakat maka proses penertiban harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur guna mengurangi potensi risiko (Barokah & Aprimawati, 2024).

Penelitian ini menemukan adanya kesamaan dengan hasil temuan dari Tefa dan Purbosiwi terkait penggunaan bahasa dalam pelaksanaan sosialisasi yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa yang baik dan sopan namun tetap mempertahankan aspek kedisiplinan di dalam komunikasi (Tefa & Purbosiwi, 2023).

Berbeda dari penelitian yang dilakukan Riau dkk di kota Probolinggo yang lebih menekankan pada pentingnya komunikasi kepemimpinan saat rapat koordinasi bersama forum masyarakat dan pentingnya standar operasional prosedur diterapkan dalam rapat koordinasi serta perlunya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mencatat hasil dalam pembahasan rapat (Riau et al., 2024). Penelitian ini justru menyoroti pentingnya komunikasi yang bersifat informatif kepada masyarakat di

wilayah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan mengutamakan pesan yang lebih ringan dan pentingnya kredibilitas dari Satpol PP.

Hasil temuan penelitian ini juga menemukan perbedaan yang mencolok terkait metode pengarahan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jepara. Metode pengarahan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara dengan lebih fokus melalui pengumuman secara lisan kepada masyarakat dan sosialisasi yang dilaksanakan rutin dalam periode mingguan (Firdaus & Eviany, 2023). Sedangkan dalam penelitian ini justru menemukan bahwa Satpol PP lebih membagi metode sosialisasi yang bukan hanya disampaikan secara lisan namun harus juga disampaikan melalui berbagai sosial media yang tersedia sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini menemukan aspek baru yang belum banyak diulas dalam penelitian terdahulu, yaitu pentingnya nama baik instansi Satpol PP dimata masyarakat dan daya tarik dari setiap anggota Satpol PP dalam meningkatkan kredibilitas lembaga Satpol PP. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya kasus-kasus yang melibatkan anggota Satpol PP dan belum idealnya postur tubuh dari anggota Satpol PP berpengaruh terhadap kredibilitas Satpol PP sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP.

IV. Kesimpulan

Strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan teori strategi komunikasi Onong Uchjana Effendy dengan menganalisis pada dimensi peranan komunikator dalam komunikasi. Dalam sebuah komunikasi faktor komunikator sangat berpengaruh, namun hasil penelitian menunjukkan kredibilitas Satpol PP Provinsi Gorontalo yang buruk dimata masyarakat dan kurangnya daya tarik yang dimiliki oleh anggota Satpol PP Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dimensi peranan komunikato dalam komunikasi belum terlaksana dengan baik dalam strategi komunikasi penertiban ruang milik jalan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan lokasi penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu segmen jalan saja, sehingga belum dapat menjangkau seluruh segmen jalan yang ada di Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berkaitan dengan ruang milik jalan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi

peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Rosyid, M. F., Yusup, Y., & Wijayanti, P. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2006 - 2018. *Geadidaktika*, 1(2), 120. <https://doi.org/10.20961/gea.v1i2.47906>
- Anugrah, D. R., Mubarrak, M. Z., Pambudi, W. A., & Sulilo, J. (2023). Analisis Permasalahan Tata Ruang Di Indonesia Pendahuluan. *Jurnal Multidisiplin Adijaya*, 01(05), 1045–1051.
- Barokah, S. I. R., & Aprimawati, B. (2024). THE COMMUNICATION STRATEGY OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE RELOCATION OF TRADERS. *Jurnal Tatapamong*, 6(September), 116–137. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.4684>
- Chand, B. J. K. (2019). LAND MANAGEMENT PROBLEMS IN NEPAL: REPERCUSSIONS OF LAND USE POLICY AND IMPLEMENTATION GAPS IN REGIONAL AND URBAN PLANNING. *ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, IV-5/W2, 17–24. <https://doi.org/10.5194/isprs-annals-IV-5-W2-17-2019>
- Chen, L., & Cai, H. (2022). Study on land use conflict identification and territorial spatial zoning control in Rao River Basin, Jiangxi Province, China. *Ecological Indicators*, 145, 109594. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109594>
- Effendy, O. U. (2009). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. In *PT Remaja Rosdakarya* (22nd ed.).
- Eviany, E. (2019). *Komunikasi Persuasif Dalam Mendukung Komitmen*.
- Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). Strategi Penertiban Tempat Karaoke Di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. *Jurnal Tatapamong*, September, 121–144. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564>
- Hasan, E. (2010). Paradigma Komunikasi Pemerintahan. *Jakarta: IPDN*.
- Koroso, N. H., & Zevenbergen, J. A. (2024). Urban land management under rapid urbanization: Exploring the link between urban land policies and urban land use efficiency in Ethiopia. *Cities*, 153, 105269. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105269>
- Maulana, I. F., & Fitri, R. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pengguna Ruang Milik Jalan Untuk Tempat Berjualan Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(1), 27–35.
- Moliju, W., Dunga, W. A., & Mandjo, J. T. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Maraknya Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian-1. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1), 75–88.
- Riau, D. P., Akbar, Y. M., Akadira, T., Muhtarom, & Diana, B. A. (2024). Communication and Coordination Innovations in Improving the Performance of

- Permits for Suitability for Spatial Use Activities. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(7), 2719–2727. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190728>
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 2(1), 35–52. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>
- Salsabila, C., Eviany, E., Danial, L. M., & Batubara, Y. E. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*, 4, 88–101.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Simarmata, T. H. (2023). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Metro. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(1), 37–44.
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>
- Tarigan, H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Journal Of Administrasion Law*, 2(17), 11–21.
- Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 162–176. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>
- Tempo. (2021). *Lebih dari 3.200 Pelanggaran Tata Ruang, BPN: Banyak Terjadi di Perkotaan*. <https://www.tempo.co/ekonomi/lebih-dari-3-200-pelanggaran-tata-ruang-bpn-banyak-terjadi-di-perkotaan-535323>
- Umar, I. (2021). Policy directions for control of land use dynamics in the Antokan Watershed, West Sumatra Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 11(1 SE-Articles), 10–18. <https://doi.org/10.29244/jpsl.11.1.10-18>
- Wasanta, T., Mujahid, Z., Sowolino, B. O., & Santosa, W. (2020). Kajian Perubahan Status Jalan Jalan Lingkar Luar Gorontalo. *Jurnal Transportasi*, 19(3), 215–224. <https://doi.org/10.26593/jt.v19i3.3674.215-224>